



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/333/Itda/2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2024
Kepada:
Yth. Camat Banjar
Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. 800.1.11.1/019/Itda/2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Predikat	Interpretasi
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,7
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,35
Kategori			B

Nilai **63,35** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sudah **Baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng masih

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. **Komponen Perencanaan Kinerja**

1) **Kualitas Perencanaan Kinerja:**

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Penjenjangan kinerja dari level pimpinan sampai dengan level individu belum seluruhnya mengacu pada diagram cascading.

2) **Pemanfaatan Perencanaan Kinerja:**

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

b. **Komponen Pengukuran Kinerja**

1) **Kualitas Pengukuran Kinerja:**

- a). SOP yang dibuat telah menggambarkan tata cara pengukuran data kinerja,
- b). Belum menggunakan media berbasis elektronik dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja,
- c). Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.

2) **Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. **Komponen Pelaporan Kinerja**

1) **Kualitas Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum spesifik.

2) **Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang

dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

d. **Evaluasi Kinerja**

1) Kualitas Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I, II, III dan IV sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat kekurangan diantaranya pada Laporan Monev belum dilampirkan dengan notulensi/ berita acara, daftar hadir yang di tanda tangani oleh pimpinan OPD serta, foto kegiatan monitoring dan evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I, II, III dan IV apabila terdapat informasi realisasi kinerja yang belum mencapai target kinerjanya maka bisa ditambahkan faktor penghambat, solusi/ rekomendasi perbaikan dimana perubahan/ penyesuaian strategi kinerja diperlukan.

2) Pemanfaatan Evaluasi.

a). Hasil evaluasi kinerja program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada, namun monitoring atas rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

b). Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

5. Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Camat Banjar Kabupaten Buleleng agar:

a. **Komponen Perencanaan Kinerja**

Melakukan penjenjangan kinerja dari level pimpinan (eselon II) sampai dengan level individu yang mengacu pada diagram cascading.

b. **Komponen Pengukuran Kinerja**

1) SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja serta kedepan

dalam melakukan monev pengukuran kinerja triwulanan tetap berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.

- 2) Pengukuran kinerja dapat sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Menyelaraskan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan, pengukuran sampai dengan pelaporan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Menyusun SOP evaluasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng No. 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Mengoptimalkan evaluasi kinerja triwulanan secara berjenjang dari program sampai dengan sub kegiatan dan membuat Laporan Hasil Evaluasi Kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Menindaklanjuti seluruh Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 dengan membuat matriks tindak lanjut.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip